

MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Rd Siti Sofro Sidiq

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: sitiosofrosidiq@lecturer.unri.ac.id

Abstrak: Tujuan dari program pemberdayaan ialah membuka aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan hidup mereka, kemiskinan juga terjadi akibat dari keterbatasan kebijakan, akses dan pendidikan sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pemberdayaan di Komunitas Adat Terpencil memiliki tujuan untuk membuat model arah kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah untuk bisa saling bersinergi sesuai dengan identifikasi setiap daerah, sehingga program-program tepat sasaran dan bisa mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara studi literatur, wawancara, dokumentasi, dan FGD sehingga mendapatkan informasi yang lebih konkrit. Hasil penelitiannya adalah model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan pertama pemetaan sosial, tahapan kedua peninjauan awal dan tahap ketiga studi kelayakan, semua tahapan tersebut harus dilalui untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Model; Komunitas Adat Terpencil; Kemiskinan

Abstract: *The purpose of the empowerment program is to open accessibility for the poor so that they can take advantage of the protection and social security provided by the government for their survival, poverty also occurs as a result of limited policies, access and education so that it makes it difficult for people to fulfill their daily lives. Empowerment in Remote Indigenous Communities has the aim of creating a model for policy direction between the central, provincial and regional levels so that they can work together in accordance with the identification of each region so that programs are right on target and can alleviate poverty. The research method used is descriptive qualitative by collecting data by means of literature studies, interviews, documentation, FGDs so as to get more concrete information. The result of the research is that the right social empowerment model to incite poverty in the Meranti Islands district requires several stages such as the first stage of social mapping, the second stage of the initial assessment and the third stage of a feasibility study, all of these stages must be passed to get the right model for empowering remote indigenous communities. more on target.*

Keywords: *Empowerment; Model; Remote Indigenous Community; Poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan diartikan sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang atau kelompok mencapai taraf kualitas hidup yang memiliki sandang, pangan, papan serta kurangnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurwati (2008) yang menjelaskan faktor timbulnya kemiskinan diantaranya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kondisi keterbelakangan. Kemiskinan juga menjadi permasalahan bagi setiap daerah, terutama bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah yang baru berdiri hasil otonomi daerah/pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau.

Kabupaten Meranti masih memiliki banyak permasalahan, dari aspek pendidikan, sosial dan budaya. Kabupaten Meranti memiliki daerah yang disebut dengan Komunitas Adat Terpencil yaitu suku Akit berbatasan langsung dengan selat malaka, suku ini masih menjaga adat istiadat mereka sehingga secara homogen mereka relatif sama.

Komunitas Adat Terpencil secara aturan Menteri Sosial No 12 Tahun 2015 menjelaskan pelaksanaan Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil yang dibagi menjadi 3 kluster. Dari ketiga kluster tersebut, Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Meranti masuk dalam kluster I sehingga secara subsistem mereka masih tertutup, hal ini membutuhkan model yang tepat dalam pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan di Suku Akit Kepulauan Meranti. Sutikno, Soedjono, Rumiati, & Trisunarno (2015) menjelaskan bahwa model pemberdayaan seharusnya menjadi paradigma dalam pembangunan sehingga memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek dari manusia, aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Dari berbagai aspek tersebut akan dikembangkan untuk memberikan dampak kepada ekonomi, sosial dan budaya setempat. Sidiq & Sulistyani (2017) memberikan gambaran bahwa tantangan dan peluang program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil terletak pada tahap persiapan dalam studi kelayakan, dimana data secara etnografis dan sosiologis akan membuat sasaran program menjadi lebih tepat sesuai kebutuhan dari daerah tersebut.

Pemberdayaan menurut Cook dan Macaulay (1997: 203) memandang masyarakat sebagai suatu subjek yang akan memberikan perubahan dengan cara membebaskan diri dari kendala dan memberi orang atau masyarakat dengan kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan, dan tindakannya. Rahim, Tahir, & Rumbia, (2014) mendefinisikan pemberdayaan sebagai bentuk bantuan yang bersifat demokrasi, mengutamakan persamaan gender dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Utami (2020) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan menciptakan aktivitas ekonomi baru sehingga keberadaanya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk memberikan model pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Meranti sesuai dengan keadaan secara geografis dan sosiologis.

METODE PENELITIAN

Metode Kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan secara lebih konkrit bagaimana model yang tepat untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kepulauan Meranti, sesuai dengan pendapat Creswell (2008:109) jenis penelitian kualitatif bergantung terhadap informasi dari informan sehingga memberikan data secara luas sesuai dengan kebutuhan dari peneliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, pendekatan induktif, *purposive sampling* sesuai kebutuhan dan mengumpulkan secara observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Data-data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan tiga pendekatan, pertama pendekatan budaya, Pendekatan ini berfokus untuk menggali potensi kebudayaan dari Komunitas Adat Terpencil, karena setiap Komunitas Adat Terpencil memiliki perbedaan dalam adat istiadat sehingga ini bisa menjadi sebuah kekuatan dari program pemberdayaan. kedua pendekatan holistik, pendekatan yang bersifat menyeluruh menggabungkan antara adat istiadat (budaya), ekonomi, sosial. Ketiga pendekatan sistemik, pendekatan yang bersifat sistem antara kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga terjadi sinergitas dalam melakukan proses pemberdayaan sosial bagi kelompok Komunitas Adat Terpencil. Semua bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal sehingga memberikan model yang tepat bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Etnografi Kepulauan Meranti memiliki adat istiadat sama dengan masyarakat Riau, dan terdapat kearifan lokal yang dipegang teguh dalam mempertahankan kehidupan. Menurut Budayawan Riau, Tenas Efendi, kearifan lokal tersebut berbunyi *kalau hidup hendak selamat, jagalah laut beserta selat*. Artinya harus mempunyai keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan Sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dijaga secara berkesinambungan secara turun temurun.

Namun demikian masyarakat suku asli yang bermukim di beberapa dusun, terutama Desa Sonde di Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai adat istiadat tersendiri/tradisional, dalam menjaga hubungan antara diri mereka dengan Sang Pencipta, hubungan mereka dengan lingkungan dimana mereka tinggal, dan hubungan mereka dengan masyarakat. Di Kepulauan Meranti terdapat beberapa pembagaian adat, seperti berikut:

Adat Sebenar Adat

Adat Sebenar Adat adalah adat yang telah diwariskan secara turun temurun secara lisan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada zaman sekarang adat ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindak-tanduk sehari-hari, sehingga disinilah letak peradaban bagi masyarakat dalam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah peradatan. Ranah Adat Sebenar Adat diantaranya adalah 1) Adat kematian, 2) Adat pernikahan, 3) Adat melahirkan, 4) Adat menjaga kampung, dan 5) Adat bermusyawarah.

Adat yang di Adatkan

Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat atas kesepakatan bersama oleh masyarakat untuk melengkapi segala sesuatu yang masih dianggap perlu. Dalam hal ini adat yang diadatkan terus mengalami kemajuan atas dasar kesepakatan bersama. Jika di kemudian hari adat tersebut tidak dianggap perlu, maka adat tersebut bisa dihilangkan seperti 1) Adat menyelesaikan konflik, 2) Adat membuka lahan, 3) Adat gotong royong, 4) Adat makan dan minum, dan 5) Adat berbahasa.

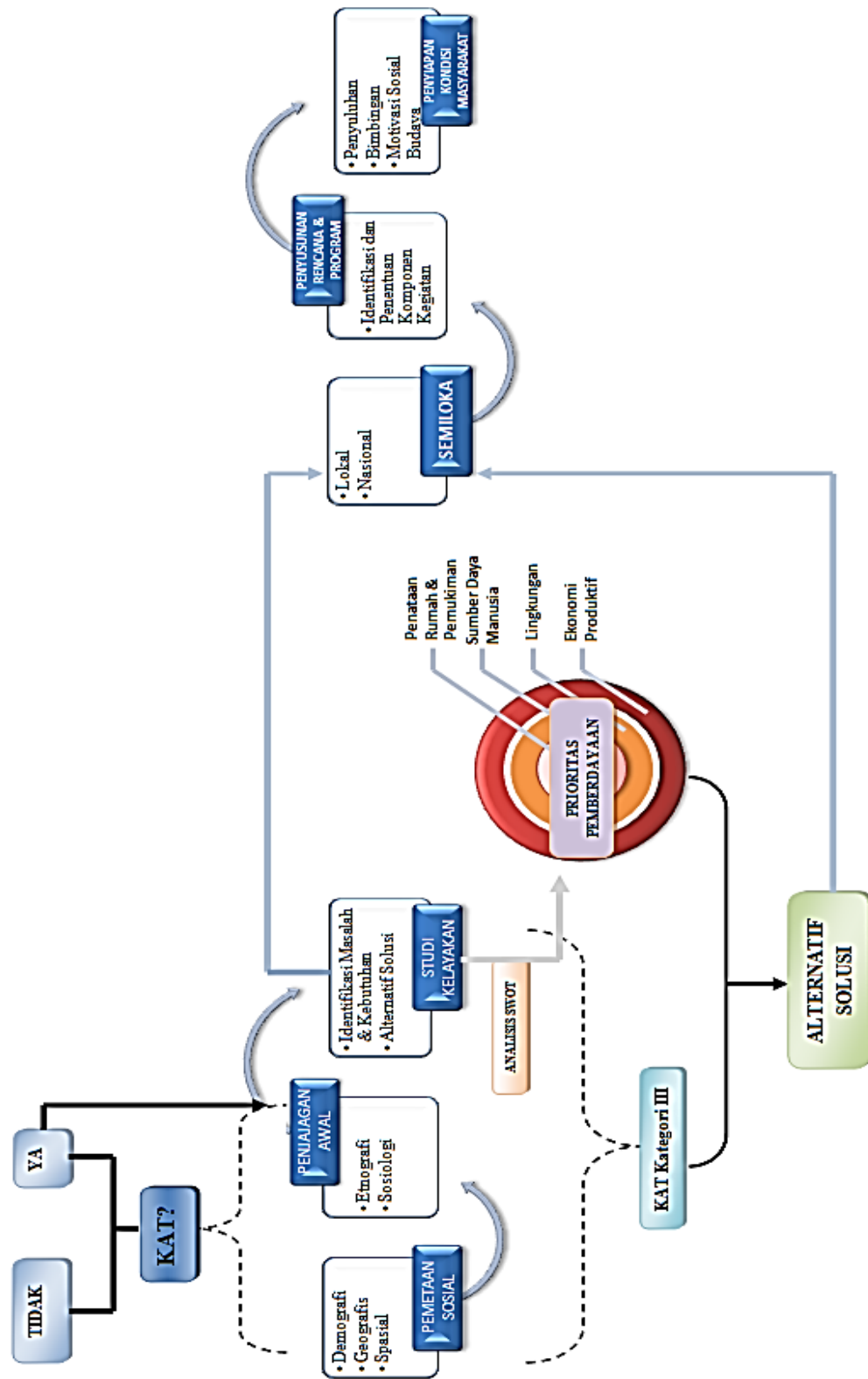
Adat yang Teradatkan

Adat yang teradatkan adalah adat kebiasaan yang secara tidak sengaja menjadi kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Adat ini biasanya menjadi kebudayaan musiman tergantung pada masa-masa terjadi. Adat tersebut tidak pernah diakui secara tulisan namun tetap dilakukan seperti biasa. Adat tersebut diantaranya adalah 1) Adat hiburan, 2) Adat berpakaian, 3) Adat bertamu, 4) Adat berdandan, dan 5) Adat pekerjaan

Dari segi garis keturunan penduduk desa menganut patrilineal dan matrilineal. Nama anak diambil dari nama Orang Tua laki-laki serta segala keputusan dalam keluarga ada di pihak laki-laki. Akan tetapi pada hal-hal tertentu yang mendominasi adalah dari pihak ibu. Dengan demikian bentuk dari garis keturunan tidak jelas dan tidak hanya terpaku pada patrilineal atau matrilineal.

Selain keunikan tentang garis keturunan, menurut Unayah.N & Sabarisman.M (2008) adat dan budaya sebenarnya di setiap masyarakat itu ada. Mereka menyebutnya dengan pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Desa Sonde adalah salah satu daerah yang masih memiliki masyarakat asli suku akit sebagai Komunitas Adat Terpencil. Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No.186 tahun 2014 mengenai pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil ada beberapa fase persiapan untuk pemberdayaan yang terangkum dalam alur berikut:

Gambar 1. Strategi Persiapan Pemberdayaan di Kepulauan Meranti Sebagai Model Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil



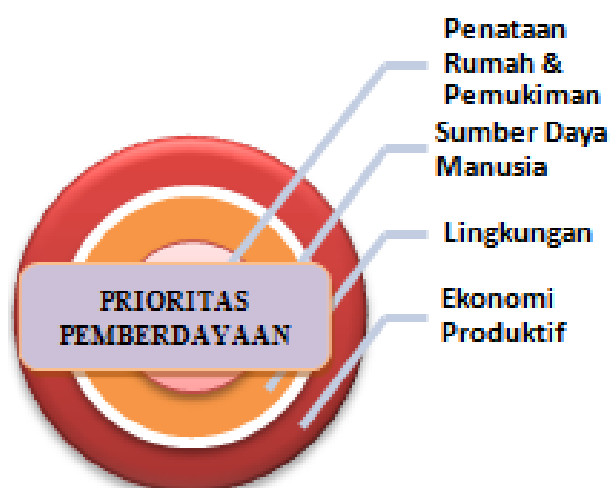
Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Skema di atas menjelaskan bahwa dalam proses persiapan pemberdayaan di Kepulauan Meranti terutama Desa Sonde ada tahapan pertama yang harus dilakukan ialah pemetaan sosial, yaitu kegiatan memverifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap lokasi yang diprediksi dihuni Komunitas Adat Terpencil (KAT). Langkah kedua adalah dengan melakukan penjajagan awal yang melihat dari aspek etnografi dan sosiologi guna menentukan KAT atau bukan KAT. Apabila calon lokasi masuk KAT, maka turut pula ditentukan kategori KAT. Sejalan dengan pendapat Pertanian & Iqra (2019) lewat perencanaan yang sistematis serta identifikasi permasalahan yang jelas maka dapat direncanakan program pemberdayaan berdasar pada analisis potensi sosial dan ekonomi.

Apabila daerah yang dikaji masuk dalam kriteria KAT, maka dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yaitu studi kelayakan. Ketiga tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa daerah yang akan diberdayakan benar-benar daerah KAT sehingga tidak terjadi salah sasaran. Data yang diperoleh dijadikan bahan kajian guna menentukan instrumen atau alternatif solusi dari permasalahan di daerah pemberdayaan. Data-data tersebut juga dipakai untuk memutuskan kategori KAT, karena setiap kategori memiliki jangka waktu pemberdayaan, aspek pemberdayaan, standar, serta perlakuan yang berbeda-beda.

Studi kelayakan adalah kegiatan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, serta alternatif pemecahan masalah KAT. Dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) diketahui bahwa Desa Sonde meskipun mempunyai peluang untuk menjadi desa yang mandiri danarganya hidup layak, namun memiliki beberapa permasalahan dan kebutuhan yang menyebabkan desa tersebut belum sejahtera. Menurut Suprastiyo (2017) dalam setiap program pemberdayaan untuk masyarakat desa memerlukan identifikasi awal sebagai data sehingga keterlibatan warga miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi satu sistem yang tidak bisa dipisahkan.

Gambar 2. Masalah & Kebutuhan



Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2017

Permasalahan yang pertama adalah keadaan rumah yang dikatakan tidak layak huni karena selain ukurannya yang kecil, di dalam rumah pun tidak terdapat pembagian yang jelas

antara kamar dan dapur sehingga satu tempat mempunyai dua fungsi. Kondisi ini tentu tidak memenuhi standar layak dan sehat. Selain itu peralatan memasak yang digunakan juga tidak memadai. Aspek lainnya adalah kondisi MCK yang sangat sederhana serta tidak memenuhi kriteria kesehatan yang ada.

Kedua adalah sumber daya manusia. Poin ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Desa Sonde karena banyaknya usia produktif dan usia sekolah. Bonus demografi dikatakan dapat membawa sebuah kemajuan jika dikelola dengan baik serta mempunyai pendidikan dan keahlian yang memadai. Namun mayoritas dari mereka tidak mengenyam pendidikan yang sesuai karena terbatasnya akses terhadap pendidikan. Sedangkan untuk orang tua banyak dari mereka yang buta huruf serta tidak memiliki keahlian khusus yang dapat memberikan penghasilan.

Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya jalan yang rusak karena belum di semen. Keterpencilan geografis yang dimiliki desa Sonde membuat desa tersebut kurang mendapatkan layanan dari Negara berupa pembangunan dan perawatan infrastruktur, sehingga hasilnya banyak jalan yang rusak, tidak layak, serta jembatan yang masih terbuat dari bambu atau kayu. Kondisi ini tentu semakin membuat warga kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi.

Terakhir adalah keberadaan tanah belukar yang luas namun belum efektif penggunaannya karena masyarakat belum memiliki keterampilan khusus untuk mengelolanya sehingga membiarkan potensi berupa tanah seluas 502 ha tersebut. Masyarakat cenderung bergantung kepada penjualan ikan yang juga tidak terlalu banyak hasilnya karena berbagai kendala.

Dengan merujuk pada kategori KAT yang dimiliki, maka alternatif solusinya bagi model pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Alternatif Solusi



Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Dalam aspek penataan Perumahan & Pemukiman, solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan bantuan rumah kepada keluarga yang rumahnya termasuk dalam standar tidak layak huni. Rumah diberikan karena termasuk salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga KAT serta sebagai salah satu upaya untuk menciptakan dan menata pemukiman yang lebih sehat serta sesuai dengan standar.

Bentuk pemberdayaan sumber daya manusia adalah dengan mempermudah akses pendidikan bagi anak usia sekolah, yaitu membangun sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah agar anak usia sekolah tidak terlalu jauh menempuh perjalanan guna mengenyam bangku sekolah. Pemberdayaan untuk orang tua berupa pelatihan seperti pelatihan membuka usaha bersama berbasis kekayaan lokal seperti rendang sagu atau pelatihan keterampilan untuk membangun rumah sehingga selain mampu mengatasi masalah kekurangan pekerja guna membangun rumah, maka juga mampu meningkatkan hubungan sosial dengan cara bergotong royong membuat rumah.

Selanjutnya adalah semenisasi jalan dan perbaikan jalan untuk mengatasi masalah lingkungan di Desa Sonde. Diperbaikinya jalan di area desa Sonde akan memberikan dampak positif kepada warga seperti mempermudah mobilitas warga dalam menjual atau mengangkut hasil produksi mereka seperti ikan atau hasil pertanian. Kondisi jalan juga akan turut serta berkontribusi terhadap kualitas interaksi sesama warga desa Sonde dan yang paling penting adalah mempermudah akses pembangunan untuk masuk ke desa ini. Hasil penelitian menemukan bahwa desa ini jarang mendapat kunjungan dan perhatian dari pemerintah, dengan jalan yang lebih bagus maka diharapkan pemerintah akan lebih memberikan perhatian kepada daerah ini.

Solusi untuk permasalahan ekonomi produktif adalah dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola tanah belukar dengan menanaminya pohon kelapa. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberi bibit serta peralatan kerja untuk mengolah tanah belukar. Tanaman kelapa merupakan salah satu pilihan yang tepat karena selain harganya yang tinggi, produksi pohon kelapa juga cukup tinggi serta manfaat lain yang dimilikinya juga bisa dijadikan alternatif ekonomi produktif seperti daun, atau kulit buahnya.

Keempat poin prioritas tersebut digambarkan secara melingkar karena semuanya saling berkaitan sehingga pemberdayaan di salah satu aspek akan berpengaruh terhadap aspek lain. Pemberdayaan di bidang lingkungan akan memudahkan masyarakat dalam memasarkan ekonomi produktif yang dihasilkan sehingga memperbaiki perekonomian keluarga. Perekonomian yang bagus membuat masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasarnya seperti peralatan rumah, peralatan memasak. Perbaikan jalan juga mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak sehingga upaya pemberdayaan di bidang sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik. Naiknya kualitas sumber daya manusia membuat warga lebih kreatif dalam menemukan dan menciptakan produk yang menghasilkan.

Ditemukannya potensi dan prioritas pemberdayaan di Desa Sonde selama proses pemetaan sosial, peninjauan awal, dan studi kelayakan tidak lepas dari kerja sama dan sinergi berbagai pihak dalam rangka memberdayakan Desa Sonde sebagai KAT menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Gambar 4. Sinergi Lintas Sektor dalam Persiapan Pemberdayaan di Desa Sonde

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Gambar diatas menunjukkan bahwa dalam proses menciptakan kesejahteraan untuk warga desa Sonde berbagai pihak harus terlibat dan bersinergi guna mencapai keberhasilan program. Hal ini karena permasalahan yang dialami warga KAT melekat dan identik dengan kriteria atau karakteristik KAT, bersifat kompleks dan multidimensional sehingga perlu upaya pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan melembaga (berkesinambungan) baik oleh pemerintah, dunia usaha dan komponen masyarakat sipil.

Setelah melakukan studi kelayakan yang menghasilkan prioritas pemberdayaan, alternatif solusi dengan mempertimbangkan kategori KAT desa Sonde, tahapan selanjutnya adalah semiloka. Kegiatan ini berupa seminar dan lokakarya yang terdiri atas semiloka daerah dan semiloka nasional. Semiloka daerah merupakan kegiatan presentasi pembahasan hasil studi kelayakan untuk mendapat saran dan pertimbangan terhadap rumusan rencana awal pemberdayaan KAT.

Semiloka nasional adalah kegiatan tindak lanjut semiloka daerah untuk merumuskan/ menetapkan rencana dan strategi pemberdayaan sosial terhadap KAT. Tahapan ini juga salah satu kegiatan yang penting dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan karena disini terdapat pertemuan *stake holder* lintas sektor mulai dari penentu kebijakan tertinggi, akademisi hingga unit pelaksana yang akan terjun ke lapangan. Sinergi berbagai pihak sangat penting untuk mendukung jalannya proses pemberdayaan terutama dalam hal kesepakatan strategi, program yang diberdayakan, anggaran dan juga aspek yang akan

dibangun baik fisik maupun non fisik serta tanggung jawab untuk sama-sama memonitor keberlangsungan program.

Setelah adanya semiloka maka dilakukan penyusunan rencana dan program dengan mengidentifikasi dan menentukan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pemberdayaan pada kurun waktu tertentu sesuai hasil kegiatan semiloka nasional. Terakhir adalah penyiapan kondisi masyarakat dengan memberikan penyuluhan, bimbingan, dan motivasi sosial budaya yang mengacu pada standar pelayanan minimum Pemberdayaan Sosial terhadap KAT, disesuaikan dengan kebutuhan setiap kategori KAT, serta mekanisme koordinasinya. Kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan motivasi berfungsi untuk mengajak masyarakat mengenal dan memahami pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka seperti dampak positif dan keuntungan apa yang akan diperoleh dari program pemberdayaan. Rohmah (2014) pemberdayaan juga bertujuan untuk peningkatan pendapatan, perluasan kemampuan rakyat (*expansion of people's capability*), meningkatnya nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial-kultural, meningkatnya kepemilikan (*wealth*) masyarakat luas melalui partisipasi & emansipasi pembangunan dan meningkatnya kadar keadilan sosial (Sufiadi, Noor, Magister, Publik, & Brawijaya, 2015).

Selain itu masyarakat juga distimulus kesadarannya untuk secara terus menerus mau berkontribusi, berpartisipasi dan membutuhkan program pemberdayaan dengan harapan ketika jangka waktu yang telah ditentukan habis, masyarakat akan mampu memberdayakan diri mereka sendiri dan tidak terus menerus menunggu asupan dari tim pemberdayaan, pemerintah atau pihak lain melainkan mampu mempunyai inisiatif sendiri.

KESIMPULAN

Model pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil untuk Kabupaten Meranti dalam mengentaskan kemiskinan melalui proses identifikasi yang cukup panjang, pertama, proses tahapan awal adalah pemetaan sosial bertujuan untuk menggali permasalahan serta potensi yang ada di daerah calon pemberdayaan, tahapan kedua yaitu penjajagan awal, melihat secara langsung kondisi daerah bersama para *stakeholder* terkait dan yang terakhir tahapan studi kelayakan memberikan solusi serta model yang tepat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program pemberdayaan sosial ini.

Rekomendasi yang tepat bagi pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah adalah menjadikan setiap proses tahapan sebuah data yang terpadu, sehingga kedepan pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil bisa lebih bermanfaat dan bisa mengentaskan kemiskinan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cook, S., & Macaulay, S. (1997). Practical steps to empowered complaint management. *Managing Service Quality: An International Journal*, 7(1), 39–42.
- Creswell, John W. 2008. *Education Research, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 4th edition*. Boston: Pearson.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 245387.
- Pertanian, F., & Iqra, U. (2019). *Proceeding of Community Development Integration of*

- Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat] M Chairul Basrun Umanailo Abstrak. 2(August), 268–277.*
- Rahim, M., Tahir, M., & Rumbia, W. A. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *The Winners, 15*(1), 23. <https://doi.org/10.21512/tw.v15i1.633>
- Rohmah, S. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah. *Sawwa, 10*(1), 59–82.
- Sidiq, R. S. S., & Sulistyani, A. (2017). Peluang Dan Tantangan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Di Desa Sungai Upih Provinsi Riau (Opportunities and Challenges on the Empowerment Program of Remote Indigenous Community in Sungai Upih Village Riau Province). *Asian Journal of Environment, History and Heritage, 1*(December), 29–38.
- Sufiadi, J., Noor, I., Magister, P., Publik, A., & Brawijaya, U. (2015). *Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin. 5*(1), 160–168.
- Suprastiyo, A. and M. (2017). Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui program nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-Mpd) Di Kabupaten Bojonegoro. *Reformasi, 7*(2), 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Sutikno, S., Soedjono, E. S., Rumiati, A. T., & Trisunarno, L. (2015). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 11*(1), 135. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>.
- Unayah.N & Sabarisman.M. (2008). Identifikasi Kearifan Lokal dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. *Sosio Informa, 83*(2), 167–173. [https://doi.org/10.1016/s0031-3939\(08\)70273-7](https://doi.org/10.1016/s0031-3939(08)70273-7).
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma. *Reformasi, 10*, 34–44. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/287209452.pdf>.